



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
NOMOR : 1612/KPN.W14-U18/SK.RA1.5/XII/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI KINERJA  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengubah tujuan abstrak menjadi langkah-langkah konkret yang terukur dan jelas, berfungsi sebagai panduan strategis untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipantau, serta mendukung pencapaian visi dan misi organisasi atau pemerintah maka perlu disusun Rencana Aksi Kinerja;
- b. Bahwa untuk menjamin penyusunan Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis dan akuntabel, diperlukan Tim Penyusun Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

4. Undang -Undang...



4. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB;

KESATU : Menunjuk nama - nama sebagaimana termuat dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Aksi Kinerja yaitu :

1. Menyusun Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo, berfungsi sebagai panduan strategis untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipantau, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Situbondo dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Rencana Aksi Kinerja memuat sasaran, indikator, program/kegiatan, rincian output dan anggaran, serta jadwal untuk satu tahun ke ke depan yang dibagi per triwulan sebagaimana formulir pada lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB melaporkan hasil penyusunan rencana aksi kinerja kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

KEEMPAT...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

---

**Ketua Pengadilan Negeri Situbondo**



**NGURAH SURADATTA D.**



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
Nomor : 1612/KPN.W14-U18/SK.RA1.5/XII/2025  
Tanggal : 15 Desember 2025  
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Kinerja  
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

**TIM PENYUSUN RENCANA AKSI KINERJA  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Dr. Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Haries Suharman Lubis , S.H.MH.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Alto Antonio, S.H., M.H.	Hakim	Pengarah dan Evaluator
4.	Maria Theresia Reny Puspita Sari, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Hari Yulanto, S.E.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Shofil Setyarini, S.Sos.	Kepala Subbagian, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris Tim
7.	Agus Widodo, SH.,MH.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Khudzaifah, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	Abd. Mukti, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
10.	Intan Mustika Atmaningrum, S.H.	Kepala ubbagian Umum dan Keuangan	Anggota
11.	Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota
12.	Anis Ismatun Nisa', S.H., M.Kn.	Analisis Perkara Peradilan	Operator dan Pengelola Data
13.	Anis Rukmawati, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Operator dan Pengelola Data



<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
14.	Diajeng Linggar Ratieh Putri Cipto, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Operator dan Pengelola Data
15.	Dany Dhiman Septyawan, S.E.	Penata Layanan Operasional	Operator dan Pengelola Data
16.	Amirul Hadi, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Operator dan Pengelola Data
17.	Hadi Prasetya, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Operator dan Pengelola Data
18.	Faris Zainul Anwar, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Operator dan Pengelola Data

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

---

**Ketua Pengadilan Negeri Situbondo**



**NGURAH SURADATTA D.**



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
Nomor : 1612/KPN.W14-U18/SK.RA1.5/XII/2025  
Tanggal : 15 Desember 2025  
Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Aksi  
Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

FORMAT RENCANA AKSI

Satuan Kerja : (a)  
Tahun Anggaran : (b)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target			
			I	II	III	IV

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				

....., ..... Januari .....

Petunjuk pengisian :

1. Header (a) diisi dengan nama Satuan Kerja;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Satuan Kerja sesuai dengan dokumen penetapan kinerja;
4. Kolom (2) diisi dengan Indikator kinerja Satuan Kerja sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Satuan Kerja;
5. Kolom (3) diisi dengan Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai setiap Indikator Kinerja Satuan Kerja;
6. Kolom (4) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap Indikator kinerja sesuai dengan dokumen penetapan kinerja;

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Situbondo**



**NGURAH SURADATTA D.**





PENGADILAN NEGERI  
SITUBONDO

# REVISI RENCANA AKSI

(0338) 671397

itpnsitubondo@gmail.com

Jl. PB. Sudirman No. 97  
Situbondo



2025

**REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2025**  
**Nomor: 1612.2/KPN.W14-U18/RA1.1/XII/2025**



**PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

Jl. Panglima Besar Sudirman No.97, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo,  
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, Telp. [\(0338\) 671397](tel:0338671397)  
Website: [www.pn-situbondo.go.id](http://www.pn-situbondo.go.id)  
Email: [itpnsitubondo@gmail.com](mailto:itpnsitubondo@gmail.com)

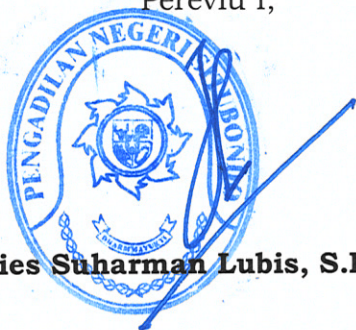
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS RENCANA AKSI TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

Kami telah mereviu Rencana Aksi Pengadilan Negeri Situbondo untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung RI untuk tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025. Perjanjian Kinerja ini berfokus pada modernisasi peradilan, efisiensi penyelesaian perkara, dan peningkatan layanan publik.

Reviu Rencana Aksi Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri bertujuan untuk memastikan keselarasan target kinerja dengan Renstra 2025-2029, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelayanan hukum. Reviu ini berfungsi sebagai pedoman operasional dan alat evaluasi kinerja aparatur dalam mencapai visi "Badan Peradilan yang Agung".

Reviu ini dilakukan secara berkala (seringkali tahunan) untuk memastikan seluruh unit peradilan di bawah Mahkamah Agung bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pereviu I,



**Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**

Pereviu II,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

**Alto Antonio, S.H., M.H.**



## **REVISI / REVIU RENCANA AKSI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TAHUN 2025**

Revisi Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo merupakan penyesuaian dokumen strategis tahunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, DIPA anggaran terbaru, serta hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan hukum, transparansi, penyederhanaan perkara melalui teknologi informasi, serta akuntabilitas (SAKIP). Revisi rencana aksi Pengadilan Negeri bertujuan untuk menyelaraskan target kinerja dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025 - 2029, meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas kinerja. Langkah ini memastikan program kegiatan berjalan terarah untuk mencapai visi "Pengadilan Yang Agung", meningkatkan kualitas pelayanan hukum, dan penanganan perkara yang cepat dan sederhana. Komponen Utama dalam Revisi Rencana Aksi PN:

- **Penyesuaian Indikator Kinerja:** Revisi pada PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan) 2025 sesuai hasil evaluasi dari Pengadilan Tinggi Surabaya.
- **Penyederhanaan Perkara:** Optimalisasi teknologi informasi (seperti E-Court/SIPP) untuk percepatan penanganan perkara.
- **Anggaran dan Sarpras:** Revisi terkait DIPA (Daftar Isian Pagu Anggaran) 01 dan 03, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pemenuhan target kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025.
- **Pelayanan Publik:** Peningkatan layanan hukum yang berkeadilan dan kepatuhan terhadap SOP Pengadilan Negeri Situbondo.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1.	Terwujudnya peradaban yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	30%	30%	30%	30%	
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8%	8%	8%	8%	
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25%	25%	25%	25%	
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	√	√	√	√	Tercapainya target durasi penanganan perkara sesuai standar yang ditetapkan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	107,190,000
	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	√	√	√	√	Efisiensi pengiriman salinan putusan (fisik/elektronik) kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah putusan diucapkan (pidana/perdata)	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	√	√	√	√	Terlaksananya hasil upaya hukum kepada pihak berperkara, dengan target 100% tepat waktu sesuai tenggang waktu hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	√	√	√	√	Meningkatkan transparansi dan percepatan layanan peradilan.	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	√	√	√	√	Meningkatkan transparansi dan kepercayaan Masyarakat.	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	√	√	√	√	Menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta memenuhi hak pihak yang menang agar isi putusan benar-benar terealisasi.	Pengakuan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	√	√	√	√	Mengukur efektivitas pemulihan keadaan kembali ke keadaan semula, serta meningkatkan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang adil dan humanis.	Pengakuan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	√	√	√	√	Mengukur efektivitas mekanisme perdamaian dan memberikan akses keadilan yang lebih cepat serta biaya ringan bagi masyarakat.	Pengakuan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	√	√	√	√	Menjauhkan anak dari proses peradilan formal dan perampasan kemerdekaan, yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka	Pengakuan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	√	√	√	√	Mendorong terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Pengakuan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	√	√	√	√	Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan	Pengakuan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	√	√	√	√	Meningkatkan transparansi penanganan perkara dari tahap penyidikan hingga persidangan	Pengakuan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98%	98%	98%	98%	98%

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	√	√	√	√	Transparansi dalam menciptakan pelayanan yang adil, cepat, dan transparan.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%	98%	98%	98%	98%
			95%	95%	95%	95%	95%
			95%	95%	95%	95%	95%
			3	3	3	3	3

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	√	√	√	√	Terbentuknya SDM yang kompeten dan berkualitas.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	√	√	√	√	Penyerapan anggaran DIPA 01 maupun 03 tepat dan cepat.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	√	√	√	√	Meningkatkan akurasi belanja, mendalihkan revisi DIPA, dan memastikan optimalisasi penyerapan dana.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	√	√	√	√	Mengukur kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	